



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

LAPORAN BULANAN APRIL TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan #kuntabel #kompeten
#harmonis #oyal #adaptif #kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

📍 Jalan. Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor. 52, Kota Palu
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan,
Palu, Sulawesi Tengah, 94231.

☎ 0451 - 483 385

📞 0811 4444 064

✉ ptun.palu@gmail.com

🌐 www.ptun-palu.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Jalan Prof Moh Yamin No 52.Kel.Birobuli Utara.Kec.Palu selatan
Sulawesi Tengah 94111

Nomor : *169* /KPTUN.W4-TUN2/T12.1/V/2025

Palu, 5 Mei 2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Bulan April 2025

Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

di

Makassar

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk **Bulan April 2025**.

Demikian kami sampaikan dan dapat berguna sebagaimana mestinya.

Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Muhammad Aly Rusmin



LAPORAN BULANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU BULAN APRIL 2025



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 52 Palu, Kode Pos 94231

Telp. 0451 – 483385, 0811 4444 064 (CICA)

Website: ptunpalu.go.id

Email: ptunpalu@gmail.com

DAFTAR ISI

DaftarIsi	2
Bab I Pendahuluan	4
A. Sejarah Singkat.....	4
B. Maksud dan Tujuan	6
Bab II Tugas Pokok dan Fungsi	7
A. Manajemen Kesekretariatan	7
1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	7
1.1. Struktur Organisasi	8
1.2. Sumber Daya Manusia	9
1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun.....	11
1.4. Pengelolaan Database dan Sikep	11
2. Umum dan Keuangan	13
2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan	13
2.1.1. Pengelolaan Persuratan.....	13
2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan	13
2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan.....	14
2.2. Pengelolaan Aset dan BMN.....	14
2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan	14
2.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN	15
2.2.3. Pengalihan dan Penghapusan BMN	16
2.3. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara	16
2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	16
2.3.2. Laporan PNBPN	17
2.3.3. Data Persekot/Uang Muka Gaji	18
2.3.4. Ralat SPM.....	18
3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	18
3.1. Revisi DIPA/POK.....	18
3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan.....	18

B. Manajemen Kepaniteraan	19
1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara	19
1.1. Laporan Keadaan Perkara	19
1.2. Laporan Jenis Perkara	19
1.3. Laporan Jumlah Perkara Yang Mengajukan Banding, Kasasi dan PK.....	20
2. Laporan Pelaksanaan SIPP	20
3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan	21
4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum	22
5. Tata Kelola Arsip Perkara.....	22
BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi.....	23
A. Kesimpulan.....	23
B. Rekomendasi.....	23
LAMPIRAN.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak H. M. Soeharto.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan kelas I yang berkedudukan di Kota Palu dan beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 52 Palu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang terjadi di Wilayah Hukumnya yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi:

1. Kota Palu
2. Kabupaten Banggai
3. Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kabupaten Banggai Laut
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Donggala
7. Kabupaten Morowali
8. Kabupaten Morowali Utara
9. Kabupaten Parigi Moutong
10. Kabupaten Poso
11. Kabupaten Tojo Una-Una
12. Kabupaten Sigi
13. Kabupaten Tolitoli

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diresmikan bersama-sama dengan PTUN Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi, dan PTUN Kendari secara simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H. pada tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan mulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejak beroperasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengalami pergantian pimpinan sebanyak 14 (empat belas) kali, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. JACOB GERUNGAN, S.H. | (1998 s.d. 1999) |
| 2. SUTOYO, S.H. | (1999 s.d. 2001) |
| 3. SULISTYO, S.H. | (2001 s.d. 2002) |
| 4. ACHMAD HUSEIN, S.H. | (2003 s.d. 2006) |
| 5. DILMAR TATAWI, S.H. | (2006 s.d. 2007) |
| 6. KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP. | (2007 s.d. 2010) |
| 7. NABARI SEMBIRING, S.H. | (2010 s.d. 2011) |
| 8. H. ASMORO BUDI SANTOSO, S.H. | (2011 s.d. 2012) |
| 9. H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. | (2012 s.d. 2015) |
| 10. FARI RUSTANDI, S.H., M.H. | (2015 s.d. 2020) |
| 11. NUR AKTI, S.H. | (2020 s.d. 2021) |
| 12. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. | (2022 s.d. 2023) |
| 13. DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H. | (2023 s.d. 2024) |
| 14. ROSIDAH, S.H. | (2024 s.d. sekarang) |

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukumnya dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

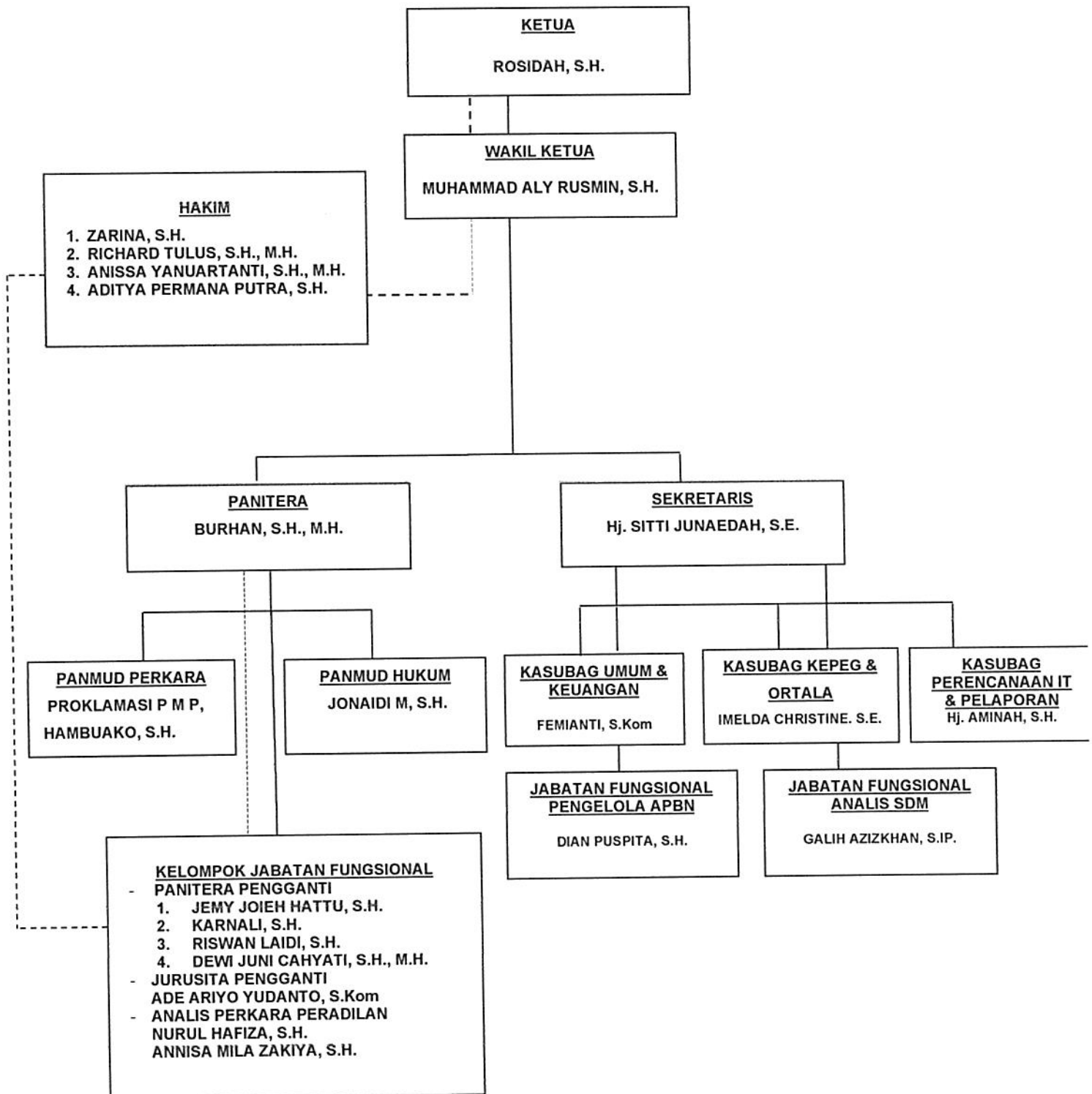
A. Manajemen Kesekretariatan

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke enam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Susunan Struktur Organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
STRUKTUR ORGANISASI
 (Sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 *jo.* Nomor 4 Tahun 2022)



1.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai, dan Honorer (PPNPN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 4 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda Perkara	: 1 orang
Panitera Muda Hukum	: 1 orang
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	: 1 orang
Kasub Umum dan Keuangan	: 1 orang
Kasub Perencanaan IT dan Pelaporan	: 1 orang
Fungsional SDM Ahli Pertama	: 1 orang
Fungsional Pengelola Keuangan APBN	: 1 orang
Panitera Pengganti	: 4 orang
Jurusita Pengganti	: 1 orang
Analisis Perkara Peradilan	: 2 orang
(PPNPN)	: 11 orang

Sedangkan susunan personil Pegawai dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Gol
1.	Ketua	Rosidah, S.H	IVc
2.	Wakil Ketua	Muhammad Aly Rusmin, S.H.	IV/b
3.	Hakim	Zarina, S.H.	IV/a
4.	Hakim	Richard Tulus, S.H., M.H.	III/b
5.	Hakim	Anissa Yanuartanti, S.H., M.H.	III/b
6.	Hakim	Aditya Permana Putra, S.H.	III/b
7.	Sekretaris	Hj. Sitti Junaedah, S.E.	IV/b
8.	Panitera	Burhan, S.H., M.H.	IV/a
9.	Panmud Perkara	Proklamasi PMP H, S.H.	III/d
10.	Panmud Hukum	Jonaidi Madri, S.H.	III/d

11.	Kasubbag PTIP	Hj. Aminah, S.H.	III/d
12.	Kasubbag Umum & Keuangan	Femianti, S.Kom	III/d
13.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Imelda Christine, S.E.	III/d
14.	Panitera Pengganti	Jemmy Joeh Hattu, S.H.	III/c
15.	Panitera Pengganti	Karnali, S.H.	III/c
16.	Panitera Pengganti	Riswan Laidi, S.H.	III/a
17.	Panitera Pengganti	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H	III/b
18.	Fungsional SDM Ahli Pertama	Galih Azizkhan, S.IP.	III/b
19.	Fungsional Pengelola APBN	Dian Puspita, S.H.	III/a
20.	Jurusita Pengganti	Ade Ario Yudanto, S.Kom	III/a
21.	Analisis Perkara Peradilan	Annisa Mila Zakiya, S.H.	III/a
22.	Analisis Perkara Peradilan	Nurul Hafiza, S.H.	III/a

Jabatan Fungsional yang diperbantukan pada Jabatan Administrasi

No	Nama	Jabatan	Diperbantukan pada
1	-	-	-

Tenaga Honorer (PPNPN)

No	Nama	Tugas	Diperbantukan pada
1	Frangky Atimang	Satpam	Hukum
2	Samsul Bahri	Satpam	Hukum
3	Faldy Abraham	Satpam	Hukum & Umum/Keuangan
4	Sukarno	Satpam	Umum & Keuangan
5	Moh Fauzan, S.Pd.I, S.H.	Sopir	Perkara & Admin SIPP
6	Ulil Amri, S.E.	Sopir	Umum & Keuangan
7	Ade Chandra Permana, S.SI	Pramubakti	Umum & Keuangan
8	Moh Fachri Darmawan, S.H.	Pramubakti	PTIP
9	Achmad Reyzha, S.H.	Pramubakti	Perkara
10	Nur Ramadhan, A.Md.MI., S.H.	Pramubakti	PTIP
11	Winda, S.E.	Pramubakti	Perkara

1.3. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Pejabat dan atau pegawai yang mendapat promosi atau mutasi adalah sebagai berikut:

Data Promosi dan Mutasi

No	Nama	Asal Mutasi	Mutasi
-	-	-	-

Pejabat dan atau pegawai yang memasuki masa pensiun adalah sebagai berikut:

Data Pegawai Memasuki Masa Pensiun

No	Nama	Masa Kerja	TMT Pensiun
-	-	-	-

1.4. Pengelolaan Database SIKEP

Database SIKEP dikelola oleh Kasub Kepegawaian dan Ortala sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Pemutakhiran database SIKEP dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Saudari Imelda Christine, S.E. Sebagai user administrator satuan kerja.

Hasil rekapitulasi kelengkapan database Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada aplikasi sikep adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Database Sikep

No.	Nama Pegawai	Status	Keterangan
1.	Rosidah, S.H.	Lengkap	-
2.	Muhammad Aly Rusmin, S.H.	Lengkap	-
3.	Zarina, S.H.	Lengkap	-
4.	Richard Tulus, S.H., M.H.	Lengkap	-
5.	Anissa Yanuartanti, S.H., M.H.	Lengkap	-
6.	Aditya Permana Putra, S.H.	Lengkap	-
7.	Hj. Sitti Junaedah, S.E.	Lengkap	-
8.	Burhan, S.H, M.H.	Lengkap	-
9.	Jonaidi M, S.H.	Lengkap	-
10.	Hj. Aminah, S.H.	Lengkap	-
11.	Imelda Christine, S.E.	Lengkap	-
12.	Femianti, S.Kom.	Lengkap	-
13.	Proklamasi P.M.P H, S.H.	Lengkap	-
14.	Jemmy Joieh Hattu, S.H., M.H.	Lengkap	-
15.	Karnali, S.H.	Lengkap	-
16.	Riswan Laidi, S.H.	Lengkap	-
17.	Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H.	Lengkap	
18.	Dian Puspita, S.H.	Lengkap	-
19.	Galih Azizkhan, S.IP.	Lengkap	-
20.	Ade Ariyo Yudanto, S.Kom.	Lengkap	-
21.	Annisa Mila Zakiya, S.H.	Lengkap	-
22.	Nurul Hafiza, S.H.	Lengkap	-

2. Umum dan Keuangan

2.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.1. Pengelolaan Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat masuk dan surat keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian umum dan keuangan. Data statistik surat masuk dan surat keluar periode April 2025:

Data Surat Masuk dan Surat Keluar

No	Bagian	Jumlah	
		Surat masuk	Surat keluar
	Kesekretariatan	-	-
1	Ketua	17	39
2	Sekretaris	-	22
	Kepaniteraan	-	-
1	Ketua	10	4
2	Panitera	2	18
	Jumlah	29	83

2.1.2. Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan di bawah kendali Umum dan Keuangan dan sebagai petugas kepustakaan (pustakawan) telah ditunjuk 2 (dua) orang PPNP sebagai petugas pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 176/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Maret 2025 berjumlah (909) buah. Pengelolaan database perpustakaan dicatat ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik sudah dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**. Untuk pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi sebagian telah dilakukan.

2.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Perlengkapan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih sangat kurang. Sarana dan Prasarana yang tersedia baru terbatas pada penyediaan ruangan khusus perpustakaan, lemari arsip buku. Sedangkan meja dan kursi petugas dan meja baca untuk pengunjung belum tersedia.

2.2. Pengelolaan Aset dan BMN

2.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan

- Luas Tanah Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu seluas 3.250 m² Luas Bangunan 2.281.63 m², sedangkan luas tanah rumah dinas seluas 2.123 m² terletak di Jalan Kijang Raya Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah selesai renovasi sehingga pada tanggal 6 November 2023 titik koordinat lokasi kantor kembali ke Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 52 Palu, Sulawesi Tengah.
- Data Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

No	Type	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
2	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
3	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
4	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
5	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
6	C Permanen	1996	265 m ²	77 m ²
7	C Permanen	2003	265 m ²	77 m ²
8	C Permanen	2003	265 m ²	77 m ²

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

1. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Ketua
2. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Wakil Ketua
3. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Hakim

4. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Hakim
 5. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Hakim
 6. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Hakim
 7. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Sekretaris
 8. Rumah dinas type C luas bangunan :77 m² untuk Panitera.
- Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terdiri dari roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan sudah dibuatkan SK Penggunaan Kendaraan Dinas.
 - Data kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut:

No	Nama Aset	Tahun	Kondisi	Pengguna
1	Toyota Vios	2007	RR	Ketua
2	Toyota KF 80	2001	RB	Sekretaris/ Operasional
3	Honda NF 125 D	2006	RR	Panmud Perkara
4	Honda Supra 125 SFC	2007	Baik	Panmud Hukum
5	Honda Revo	2009	Baik	Panitera
6	Honda Revo	2009	Baik	Kasubbag PTIP
7	Honda Revo	2009	Baik	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
8	Honda Supra NF 125 TRF	2008	Baik	Kasubbag Umum dan Keuangan
9	Honda GL Pro	2006	RR	Panitera Pengganti

2.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Penetapan Status dan Penggunaan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Nomor: 369/Sek/SK.PL1.2/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 selain tanah dan/atau bangunan dan kendaraan bermotor;

2. Nomor: 105/KM.6 /KNL.1603/2024 tanggal 29 Mei 2024 berupa tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
3. Nomor: 912/Sek/SK.PL.1.2/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 selain tanah/atau bangunan;
4. Nomor: 146/KM.6/knl.1603/2024 tanggal 15 Juli 2024 berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dititipkan status penggunaannya pada Mahkamah Agung RI.

2.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

- Tidak ada pengalihan status Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1670/Sek/SK.PL.1.2.3/XII/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa gedung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara

2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan April 2025

No	Belanja	DIPA (005.01)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bln ini	
1	Pegawai(51)	3.652.382.000,-	287.912.077,-	1.424.406.788,-	2.227.975.212,-
2	Barang(52)	1.192.461.000,-	66.420.190,-	295.051.354,-	897.429.646,-
3	Modal(53)	120.000.000,-	0,-	0,-	120.000.000,-

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan pos belanja:

Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan April 2025

No	Belanja	DIPA (005.05)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S.d. Bln ini	
1	Barang (52)	69.703.000,-	5.000.000,-	12.125.000,-	57.578.000,-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran

2.3.2 Laporan PNB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Bulan April 2025 secara umum sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PNB

No	Akun	Jenis Pendapatan	Bulan lalu	Bulan ini
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	892.800,-	892.800,-
2	423911	Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3	423991	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0
4	425232	Uang Meja (Leges)	120.000,-	60.000,-
5	425233	Ongkos Perkara	500.000,-	150.000,-
6	425239	Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.243.500,-	594.000,-
		Total	2.756.300,-	1.696.800,-

Laporan realisasi PNB secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

2.3.3. Data persekot/Uang Muka Gaji

Tidak ada Pegawai dan Hakim mengajukan persekot gaji pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

2.3.4. Ralat SPM

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak melakukan ralat SPM.

3. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada Bulan April 2025 telah dilaksanakan revisi kedua DIPA 01 dan DIPA 05.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

- Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP. PTUN Palu menggunakan penyedia layanan internet dari Telkom, dengan paket astinet Dedicated 30 Mbps dan Broadband 200 Mbps. Nomor: K.TEL.1097/HK.810/DR7-1A200000/2024 Tipe Permintaan layanan baru.

B. Manajemen Kepaniteraan

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan April 2025 sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Bln lalu	Masuk bln ini	Putus bln ini	Sisa sd bln ini	Keterangan			
						Cabut	Gugur	PLW	Dis misal
1	Gugatan	3	2	-	5	-	-	-	-
2	Banding	9	-	2	7	-	-	-	-
3	Kasasi	28	-	6	22	-	-	-	-
4	PK	3	-	-	1	-	-	-	-
5	Eksekusi	14	-	-	14	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode Bulan April 2025 sebagai berikut:

Laporan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa bln lalu	Cabut	Ditolak	Masuk bulan ini	dikabulkan	Tidak diterima	Sisa bln ini
1	Pertanahan	1	-	-	1	-	-	2
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-
3	Perizinan	-	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum /Parpol	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	-	-	1	-	-	2
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-
10	Pergantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-

11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-
17	Merek	-	-	-	-	-	-	-
18	Lain-lain	1	-	-	-	-	-	1
	Total	3	-	-	2	-	-	5

- 1.3. Laporan jumlah perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK
Laporan Jumlah Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode
Bulan April 2025 sebagai berikut:

Laporan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara yang mengajukan	s.d. Bln Lalu	Masuk Bulan Ini	Putus	s.d. Bln ini
1	Banding	7	-	2	5
2	Kasasi	22	-	0	10
3	Peninjauan Kembali	2	-	-	2
	Total	31	-	8	23

2. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah SIPP Versi 5.6.6 Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Maret 2025 adalah sebesar **700,00% (data dari SIPP MA)**. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah Jaringan Internet sedangkan hambatan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia.

3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah memiliki sarana meja Informasi dan Pengaduan, dan Petugas Meja Informasi dan Pengaduan sudah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 21/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025, tanggal 24 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Sarana lainnya adalah tersedianya buku register meja informasi, blangko-blangko permohonan. Untuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SPAN sudah menggunakan aplikasi Whistle Blowing System Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI).

Permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu periode bulan April 2025 nihil.

Buku Register Informasi

No	Pemohon	Tgl diterima	Objek permohonan	Tindak Lanjut
1.	-	-	-	-

Jumlah pengaduan pada Bulan April 2025 yang telah masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Nihil.

Buku Register Pengaduan

No	Sumber Pengaduan	Tgl diterima	Subjek	No. Register
1.	-	-	-	-

4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama Kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Lembaga Pemberi layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Laporan penyerapan Anggaran Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dapat dilihat pada lembar lampiran.

5. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan ke dalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada Kepaniteraan Muda Perkara, sedangkan arsip perkara dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum. Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Muda Hukum, untuk diarsipkan di ruang arsip perkara.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Bagian Kesekretariatan Tugas dan Fungsinya sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini untuk Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi sudah melakukan revisi kedua Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA 01 dan DIPA 05. Pada Bagian Umum dan Keuangan realisasi anggaran DIPA 01 sebesar 8.30% dan DIPA 05 sebesar 6.70%
2. Bagian Kepaniteraan pada Bulan Februari perkara yang masuk 1 (satu), sehingga jumlah perkara sisa bulan ini sejumlah 5 (lima) perkara.

B. Rekomendasi

1. Dengan keterbatasan sumber daya manusia tidak adanya staf pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. **Sangat diharapkan realisasi penambahan Pegawai Golongan II dan Golongan III** di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebanyak 20 (dua puluh) orang sebagai berikut:
 - Kepegawaian : 3 orang
 - Umum : 7 orang
 - PTIP : 3 Orang
 - Hukum : 3 Orang
 - Perkara : 4 Orang
2. Diharapkan penambahan 3 (tiga) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) untuk Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris, dan Kendaraan Operasional Dinas roda 2 (dua)

sebanyak 3 (tiga) unit untuk kendaraan Bendahara dan Jurusita Pengganti dalam upaya kelancaran aktivitas kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
Demikian Laporan Bulanan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

 Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Muhammad Aly Rusmin

LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.05

BULAN APRIL TAHUN 2025

SATUAN KERJA : (578850) , (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
 K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & (05) BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.578850/2025 & 005.05.2.578851/2025 tgl. 02-12-2024

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA		Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
					Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.1800.578850.578851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	5.034.546.000,00		1.372.230.875,00	27,26	359.332.267,00	7,14	1.731.563.142,00	34,39	3.302.982.858,00	65,61
	005.01.1800.578850	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4.964.843.000,00		1.365.105.875,00	27,50	354.332.267,00	7,14	1.719.438.142,00	34,63	3.245.404.858,00	65,37
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.844.843.000,00		1.365.105.875,00	28,18	354.332.267,00	7,31	1.719.438.142,00	35,49	3.125.404.858,00	64,51
		BELANJA PEGAWAI	3.652.382.000,00		1.136.494.711,00	31,12	287.912.077,00	7,88	1.424.406.788,00	39,00	2.227.975.212,00	61,00
	005.01.WA.6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.843.843.000,00		1.365.105.875,00	28,18	354.332.267,00	7,32	1.719.438.142,00	35,50	3.124.404.858,00	64,50
	005.01.WA.6986.EBA.994.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.652.382.000,00		1.136.494.711,00	31,12	287.912.077,00	7,88	1.424.406.788,00	39,00	2.227.975.212,00	61,00
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.118.140.000,00		339.543.580,00	30,37	86.069.920,00	7,70	425.613.500,00	38,06	692.526.500,00	61,94
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	22.000,00		4.100,00	18,64	868,00	3,95	4.968,00	22,58	17.032,00	77,42
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	70.800.000,00		24.330.190,00	34,36	6.190.380,00	8,74	30.520.570,00	43,11	40.279.430,00	56,89
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	26.500.000,00		5.783.072,00	21,82	1.468.328,00	5,54	7.251.400,00	27,36	19.248.600,00	72,64
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00		11.520.000,00	28,57	2.880.000,00	7,14	14.400.000,00	35,71	25.920.000,00	64,29
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	91.000.000,00		19.580.000,00	21,52	4.895.000,00	5,38	24.475.000,00	26,90	66.525.000,00	73,10
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	6.600.000,00		4.157.336,00	62,99	182.121,00	2,76	4.339.457,00	65,75	2.260.543,00	34,25
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	58.000.000,00		15.932.400,00	27,47	3.983.100,00	6,87	19.915.500,00	34,34	38.084.500,00	65,66
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511129	Beban Uang Makan PNS	248.000.000,00		28.531.000,00	11,50	15.058.000,00	6,07	43.589.000,00	17,58	204.411.000,00	82,42
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13.000.000,00		1.480.000,00	11,38	370.000,00	2,85	1.850.000,00	14,23	11.150.000,00	85,77
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	162.000.000,00		24.300.000,00	15,00	8.100.000,00	5,00	32.400.000,00	20,00	129.600.000,00	80,00
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511324	Beban Tunjangan PPh Pejabat Negara	242.000.000,00		109.333.033,00	45,18	20.714.360,00	8,56	130.047.393,00	53,74	111.952.607,00	46,26
	005.01.WA.6986.EBA.994.001.A.511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.576.000.000,00		552.000.000,00	35,03	138.000.000,00	8,76	690.000.000,00	43,78	886.000.000,00	56,22
		BELANJA BARANG	1.192.461.000,00		228.611.164,00	19,17	66.420.190,00	5,57	295.031.354,00	24,74	897.429.646,00	75,26
	005.01.WA.6986.EBA.994.002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1.191.461.000,00		228.611.164,00	19,19	66.420.190,00	5,57	295.031.354,00	24,76	896.429.646,00	75,24
	005.01.WA.6986.EBA.994.002.A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	450.183.000,00		103.428.980,00	22,97	32.620.000,00	7,25	136.048.980,00	30,22	314.134.020,00	69,78
	005.01.WA.6986.EBA.994.002.A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	450.183.000,00		103.428.980,00	22,97	32.620.000,00	7,25	136.048.980,00	30,22	314.134.020,00	69,78
	005.01.WA.6986.EBA.994.002.A.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	005.01.WA.6986.EBA.994.002.A.521811	Beban Untuk Persediaan Barang Konsumsi	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	005.01.WA.6986.EBA.994.002.B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	211.050.000,00		64.262.465,00	30,45	15.237.800,00	7,22	79.500.285,00	37,67	131.549.735,00	62,33
	005.01.WA.6986.EBA.994.002.B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	180.000.000,00		45.000.000,00	25,00	15.000.000,00	8,33	60.000.000,00	33,33	120.000.000,00	66,67
	005.01.WA.6986.EBA.994.002.B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.000.000,00		931.000,00	11,64	124.000,00	1,55	1.055.000,00	13,19	6.945.000,00	86,81
	005.01.WA.6986.EBA.994.002.B.522111	Beban Langganan Listrik	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

BULAN APRIL TAHUN 2025

SATUAN KERJA : (57850) , (57851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & (05) BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.578850/2025 & 005.05.2.578851/2025 tgl. 02-12-2024

005.01.WA.6986.EBA.994.002.B.522112	Beban Langganan Telepon	5.000.000,00	397.283,00	7,95	113.800,00	2,28	511.083,00	10,22	4.488.917,00	89,78
005.01.WA.6986.EBA.994.002.B.522141	Beban Sewa Bangunan dan Halaman Gedung Kantor	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
005.01.WA.6986.EBA.994.002.B.522141	Beban Sewa Web Hosting	18.050.000,00	17.934.182,00	99,36	0,00	0,00	17.934.182,00	99,36	115.818,00	0,64
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C	PEMELIHARAAN KANTOR	306.042.000,00	20.930.375,00	6,84	14.819.390,00	4,84	35.749.765,00	11,68	270.292.235,00	88,32
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung Musholah	1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.000,00	100,00
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523111	Beban Pemeliharaan Pos Jaga	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.000,00	100,00
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	60.000.000,00	1.685.375,00	2,81	1.030.000,00	1,72	2.715.375,00	4,53	57.284.625,00	95,47
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523111	Beban Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	16.697.000,00	1.400.000,00	8,38	740.000,00	4,43	2.140.000,00	12,82	14.557.000,00	87,18
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523111	Beban Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00	100,00
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung MEP	5.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	100,00
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (Rumah Dinas 8 Unit)	43.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.120.000,00	100,00
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523119	Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas	16.577.000,00	7.665.000,00	46,24	500.000,00	3,02	8.165.000,00	49,25	8.412.000,00	50,75
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523119	Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00	0,00	0,00	2.090.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.WA.6986.EBA.994.002.C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.825.000,00	8.090.000,00	5,19	12.549.390,00	8,05	20.639.390,00	13,25	135.185.610,00	86,75
005.01.WA.6986.EBA.994.002.D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	139.223.000,00	23.987.421,00	17,23	3.743.000,00	2,69	27.730.421,00	19,92	111.492.579,00	80,08
005.01.WA.6986.EBA.994.002.D.521111	Beban Keperluan Perkantoran (Pakalan Dinas)	32.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.523.000,00	100,00
005.01.WA.6986.EBA.994.002.D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56.700.000,00	7.440.000,00	13,12	3.720.000,00	6,56	11.160.000,00	19,68	45.540.000,00	80,32
005.01.WA.6986.EBA.994.002.A521811	Beban Untuk Persediaan Barang Konsumsi	50.000.000,00	16.547.421,00	33,09	23.000,00	0,05	16.570.421,00	33,14	33.429.579,00	66,86
	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Kudapan/ Snack)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
005.01.WA.6986.EBA.994.002.E	KONSULTASI KE PUSAT/TK. BANDING	81.263.000,00	14.801.923,00	18,21	0,00	0,00	14.801.923,00	18,21	66.461.077,00	81,79
005.01.WA.6986.EBA.994.002.E.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pusat/Tk.Banding)	81.263.000,00	14.801.923,00	18,21	0,00	0,00	14.801.923,00	18,21	66.461.077,00	81,79
	PEMBINAAN/RAPAT KORDINASI TK. BANDING	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RAKORNAS)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
005.01.WA.6986.EBA.994.002.F	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL	2.700.000,00	1.200.000,00	44,44	0,00	0,00	1.200.000,00	44,44	1.500.000,00	55,56
005.01.WA.6986.EBA.994.002.F.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	1.200.000,00	44,44	0,00	0,00	1.200.000,00	44,44	1.500.000,00	55,56
005.01.WA.6986.EBA.994.002.F.524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Akurasi Data Koorwil)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
005.01.WA.6986.EBA.994.002.G	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
005.01.WA.6986.EBA.994.002.G.521119	Spanduk Pelantikan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
005.01.WA.6986.EBA.994.002.G.522191	Jasa Rohanlawan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
051	LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
051.0A	DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00

SATUAN KERJA
K/L
UNIT ORGANISASI
NO./TGL DIPA

	005.01.01.1066.994.002.F.521211	Belanja Bahan (Percetakan Bahan)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
	051	DUKUNGAN MANAJEMEN NON OPERASIONAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
	051.0A	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002.F.521252	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstra-Komptabel (Kursi Kerja)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00
		BELANJA MODAL	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	100,00
	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.053.0A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.058.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Meja Kerja dan Kursi Kerja)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.058.532111	-	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	100,00
	005.01.02.1071.951.054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	100,00
	005.01.02.1071.951.058.533111	Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pasca Gempa	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	100,00
	005-05-1800-578851	RADAN PERADILIAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	69.703.000,00	7.125.000,00	10,22	5.000.000,00	7,17	12.125.000,00	17,40	12.125.000,00	17,40	57.578.000,00	82,60	57.578.000,00	82,60	57.578.000,00	82,60	82,60
		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	69.703.000,00	7.125.000,00	10,22	5.000.000,00	7,17	12.125.000,00	17,40	12.125.000,00	17,40	57.578.000,00	82,60	57.578.000,00	82,60	57.578.000,00	82,60	82,60
32	005.05.BF	Program Penegakan Pelayanan Hukum	69.703.000,00	7.125.000,00	10,22	5.000.000,00	7,17	12.125.000,00	17,40	12.125.000,00	17,40	57.578.000,00	82,60	57.578.000,00	82,60	57.578.000,00	82,60	82,60
	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	69.703.000,00	7.125.000,00	10,22	5.000.000,00	7,17	12.125.000,00	17,40	12.125.000,00	17,40	57.578.000,00	82,60	57.578.000,00	82,60	57.578.000,00	82,60	82,60
	005.05.BF.1059.AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	12.000.000,00	650.000,00	5,42	2.600.000,00	21,67	3.250.000,00	27,08	3.250.000,00	27,08	8.750.000,00	72,92	8.750.000,00	72,92	8.750.000,00	72,92	72,92
	005.05.BF.1059.AEA.002.051.0A	Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12.000.000,00	650.000,00	5,42	2.600.000,00	21,67	3.250.000,00	27,08	3.250.000,00	27,08	8.750.000,00	72,92	8.750.000,00	72,92	8.750.000,00	72,92	72,92
	005.05.BF.1059.AEA.002.051.0A	Pelaksanaan Operasional Persidangan																
	005.05.BF.1059.AEA.002.051.0A.521211	Konsumsi Pengamanan Sidang	12.000.000,00	650.000,00	5,42	2.600.000,00	21,67	3.250.000,00	27,08	3.250.000,00	27,08	8.750.000,00	72,92	8.750.000,00	72,92	8.750.000,00	72,92	72,92
	BCA	Perkara Hukum Perseorangan	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	100,00	405.000,00	100,00	405.000,00	100,00	100,00
	BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Blava Perkara	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	100,00	405.000,00	100,00	405.000,00	100,00	100,00
	005.05.BF.1059.BCA.001.051	Pelaksanaan Pembebasan Blaa Perkara (Prodeo)	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00
	005.05.BF.1059.BCA.001.051.0A.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00	100,00
	005.05.BF.1059.BCA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00	100,00
	005.05.BF.1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33.000.000,00	6.475.000,00	19,62	2.400.000,00	7,27	8.875.000,00	26,89	8.875.000,00	26,89	24.125.000,00	73,11	24.125.000,00	73,11	24.125.000,00	73,11	73,11
	005.05.BF.1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000,00	6.475.000,00	19,62	2.400.000,00	7,27	8.875.000,00	26,89	8.875.000,00	26,89	24.125.000,00	73,11	24.125.000,00	73,11	24.125.000,00	73,11	73,11
	005.05.BF.1059.QBA.001.051.0A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum																
	005.05.BF.1059.QBA.001.051.0A.521211	Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4.200.000,00	1.675.000,00	39,88	0,00	0,00	1.675.000,00	39,88	1.675.000,00	39,88	2.525.000,00	60,12	2.525.000,00	60,12	2.525.000,00	60,12	60,12
	005.05.BF.1059.QBA.001.051.0A.522131	Beban Jasa Konsultan (Jasa Konsultasi Hukum)	28.800.000,00	4.800.000,00	16,67	2.400.000,00	8,33	7.200.000,00	25,00	7.200.000,00	25,00	21.600.000,00	75,00	21.600.000,00	75,00	21.600.000,00	75,00	75,00

BULAN APRIL TAHUN 2025

SATUAN KERJA : (578850) , (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & (05) BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.578850/2025 & 005.05.2.578851/2025 tgl. 02-12-2024

005.05.BF.1059.QCA.002	Perkara Hukum Perseorangan	24.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.298.000,00	100,00
005.05.BF.1059.QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	24.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.298.000,00	100,00
005.05.BF.1059.QCA.002.051.0A	Sidang di luar Gedung Pengadilan										
005.05.BF.1059.QBA.001.051.0A.522191	Belanja Jasa Lainnya	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
005.05.BF.1059.QBA.001.051.0A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698.000,00	100,00

Pada, 30 April 2025
Kuasaku Pegguna Anggaran
HJ. SITI UNNEDAH, SE
NIP. 19670121992032002

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBIP

FORM 01

TAHUN : 2025
 BULAN : April
 NOMOR / TANGGAL DIPA : - / -
 DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Sulawesi Tengah / Kota Palu
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
 KPPN : P A L U

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3	-	Rp. 892.800	Rp. 892.800
		JUMLAH I			Rp. 892.800	Rp. 892.800
2		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Permohonan Banding	1	50	Rp. 50.000	Rp. 50.000
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	3	30	Rp. 90.000	Rp. 90.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya				
		- Redaksi Putusan/ Penetapan	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	9	10	Rp. 90.000	Rp. 90.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Termohon	3	10	Rp. 30.000	Rp. 30.000
		- Penetapan Pengumuman Eksekusi	1	25	Rp. 25.000	Rp. 25.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	3	10	Rp. 30.000	Rp. 30.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	3	10	Rp. 30.000	Rp. 30.000
		- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	138	500	Rp. 69.000	Rp. 69.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	3	10	Rp. 30.000	Rp. 30.000
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		JUMLAH II			Rp. 804.000	Rp. 804.000
		JUMLAH I & d II			Rp. 1.696.800	Rp. 1.696.800



Palu, 2 Mei 2025
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Galih Asyraf, S.IP.
 NIP. 199200372019031000